



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 119 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 31 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 4 September 2019



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 95 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan dari Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagai fungsi operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun.

RKPD Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2020.

RKPD Tahun 2020 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun kedalam Renja PD Tahun 2020 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat analisis gambaran pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah serta hasil evaluasi Renja PD. Penyusunan Renja yang merupakan satu bagian dari tahapan penyusunan Renja PD; dilakukan melalui tahapan (1) Persiapan penyusunan Renja PD; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD; (3) Penyusunan Rancangan Renja PD; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan (6) Penetapan Renja PD.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran teknis operasional Renstra yang menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah, sehingga dapat diwujudkan dan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas, organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

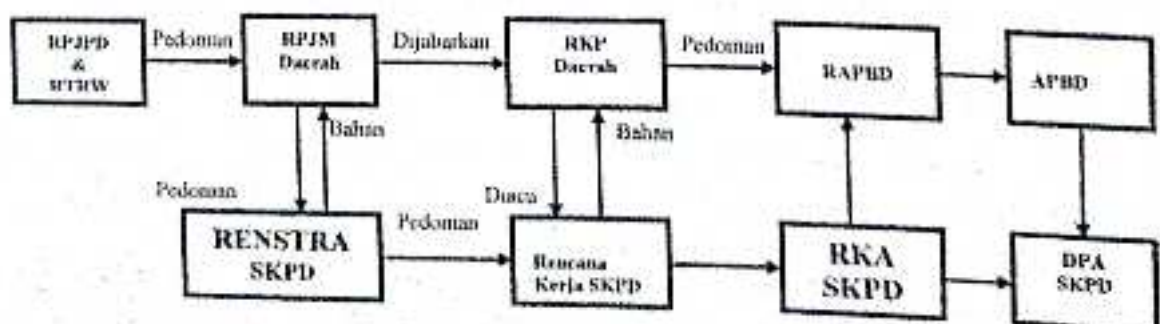
RKPD Tahun 2020 yang disusun saat ini merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD Tahun 2020 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Asas Keadilan: tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Pusat, Propinsi dan Daerah adalah sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini:



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 31 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor;188.45./983/KEP/35.07.013/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor; 188.45/653/KEP/35.07.13/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor;188.45/238/KEP/35.07.013/2019 Tentang Tim Penyusun rencana kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

- a. menjabarkan rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2020;
- b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020;
- c. mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp1.945.088.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terurai dalam 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, dengan realisasi fisik mencapai 100%, dan realisasi keuangan sebesar 99%, dengan demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 1%.

Target capaian kinerja pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 78%, dapat terealisasi sebesar 100%. Adapun pada Program Peningkatan Inovasi Daerah dengan target capaian kinerja sebesar 65%, mampu terealisasi sebesar 100%. Ini menunjukkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah terpenuhinya target kinerja sesuai dengan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai "*Pengkaji/Peneliti*", yang akan

menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dasar kebijakan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penilaian internal atas kinerja serta hasil identifikasi terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belum adanya tenaga peneliti;
2. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
3. Keterbatasan anggaran;
4. Prasarana yang belum memadai;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka masih diperlukan peningkatan kinerja organisasi melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang perlu dilaksanakan secara berkala, sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Strategi
 - a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Litbang sebagai upaya untuk mencapai hasil penelitian dan pengembangan sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam upaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun

2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.

- d. Meningkatkan kualitas kelitbangan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Kebijakan

- a. Mengisi kekosongan tenaga Peneliti;
- b. mengoptimalkan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan serta Informasi;
- c. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Bidang Pemerintahan, di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi, di Bidang Pembangunan serta di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- e. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah (DRD).

Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2019 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian RenstraPerangkat Daerah s.d. Tahun 2019
Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/Program/ Kegiatan	Tuduhan, Sanksi Program/Proses dan Kegiatan (Output)	Target Kuantitas Capaian Program Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kuantitas Hingga Program dan Keputusan 9/4 Tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program /Kegiatan Kinerja (1) Tahun berjalan (2018)	Pencapaian Capaian Target Renstra/Program/Kegiatan Renstra/Perangkat Daerah s.d. Th. 2019 Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Target Realisasi (%)
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 17/6	9	10 = 347,9	11 = (10/4)
1	4.404.33.01	Uraian : Organisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Peradilan Program: Administrasi Pemerintahan	Target kelengkapan administrasi perencanaan	100%						
1	4.404.33.01.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penggantian surat masuk dan surat keluar	9500 buah	1700 buah	1700 buah	100	1700 buah	3103 buah	30,04
2	4.404.33.01.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengisian Listrik, Air minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	69 bulan	25,00
3	4.404.33.01.03	Pengadaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pejabat Pengelola Administrasi keuangan	74 OH	67 OS	64 OH	100	64 OS	143 OS	21,43
4	4.404.33.01.04	Pengadaan Jasa Kesehatan Lanjut	jumlah tenaga kesehatan	10 OS	1 OS	1 OS	100	1 OS	10 OS	80,00
5	4.404.33.01.05	Pengadaan Alat Tulis Kantor	jumlah pengadaan alat tulis kantor MAG. GABUSKOR	430 jenis	2287 jenis	2207 jenis	100	2207 jenis	4701 jenis	26,75
6	4.404.33.01.06	Pengadaan Barang Cetak dan Pengarsipan	jumlah pengadaan barang cetakan MAG. GABUSKOR	35 jenis	2470 jenis	2470 jenis	100	2470 jenis	1049 jenis	26,71
7	4.404.33.01.07	Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Instalasi, Gedung dan Perawatan Instalasi	jumlah Bahan Baku dan perawatan perantara - undangan yang diterbitkan	15 Zimaster	2- ekstemporal	24 ekstemporal	100	24 ekstemporal	104 ekstemporal	373,33
8	4.404.33.01.08	Pengadaan layanan dan jasa pengelolaan informasi dan komunikasi ke luar daerah	jumlah layanan dan informasi yang diterbitkan	3240 Pak	087 pack	487 pack	100	487 pack	1247 pack	39,09
9	4.404.33.01.09	Pengadaan layanan dan jasa ke luar daerah	jumlah layanan dan komunikasi ke luar daerah	449 OHK	89 CJK	29 OHK	100	89 OHK	362 OHK	41,52

10	4.404.33.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke dalam daerah	Jumlah pertemuan dinas dalam daerah	729 ORK	129 ORK	129 ORK	129 ORK	129 ORK	200	383 ORK	641 ORK	52,04
11	4.404.33.01.11	Program Penyediaan Komputer Listrik	Jumlah komputer laptop atau personal komputer kantor	30 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	100	12 jenis	12 jenis	23,23
11	4.404.33.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah Kabupaten	Cakupan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan baik	100%	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	16 Unit	20 Unit	44,04
1	4.404.33.02.01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terdistribusi	30 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	0 Unit	2 Unit	0,00
2	4.404.33.02.02	Memelihara rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	0 Unit	0,00
3	4.404.33.02.03	Pembekalan rutin/berkala kendaraan dinas/government	Jumlah kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah	24 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	8 Unit	18 Unit	33,33
4	4.404.33.02.04	Pembelian bahan tulis/kebersihan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terdistribusi	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	27 Unit	100	6 Unit	60 Unit	22,22
III	4.404.33.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Kabupaten	Sarana dan prasarana yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%	100	0 Unit	0 Unit	0,00
1	4.404.33.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Kerja	Jumlah Pakaian Dinas	126 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	100	40 orang	40 orang	29,41
1	4.404.33.03.04	Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing	Jumlah peserta pelatihan bahasa asing	100%	11 ORK	11 orang	11 orang	11 orang	100	22	44 orang	13,23
1	4.404.33.04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan formal	100%	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	100	0 orang	0 orang	0,00
V	4.404.33.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan siparis kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja yang diunggah secara online yang baik	35 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	100	14 laporan	14 laporan	42,00
1	4.404.33.05.01	Penggunaan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Kinerja SIPARIS	Jumlah laporan kinerja yang diunggah secara online yang baik	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	20,00
2	4.404.33.05.02	Penggunaan laporan keuangan dan keuangan lainnya	Jumlah dokumen keuangan yang diunggah secara online yang baik	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	6,67
3	4.404.33.05.03	Penggunaan laporan keuangan dan keuangan lainnya	Jumlah dokumen keuangan yang diunggah secara online yang baik	100%	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	0 dokumen	0 dokumen	0,00
VI	4.404.33.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang diunggah	13 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	7,69
1	4.404.33.06.01	Peningkatan dan pengembangan bidang pemerintahan/siparis/standarisasi bidang teknologi tepat guna	Jumlah dokumen yang diunggah	13 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	7,69
2	4.404.33.06.02	Peningkatan dan pengembangan bidang teknologi tepat guna	Jumlah dokumen yang diunggah	13 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	7,69

3	4.404.33.06.03	Penelitian/Kajian/ studi/ analisis dan revisi bidang Pengembangan kawasan	Jumlah dokumen hasil kajian	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	8,33
VII	4.404.33.07	Pengumpulan, Pengolahan dan penyusunan informasi, penelitian dan pengembangan, pengolahan dan penyusunan informasi penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai jumlah dokumen hasil kajian	100% 9 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	11,11
VIII	4.404.33.08	Pengembangan Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kemasyarakatan	Persentase hasil kegiatan kegiatan yang sesuai dengan strategi pembangunan pembah- aruan	100% 13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
I	4.404.33.08.01	Bidang Sosial Budaya/ Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.08.02	Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.08.03	Pengumpulan, Kajian/ Studi/ Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
IV	4.404.33.09	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kerang Kerinci, Investasi Dan Kerjasama	Persentase hasil kegiatan kegiatan yang sesuai dengan strategi pembangunan pembah- aruan	100% 13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
1	4.404.33.09.01	Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.09.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
X	4.404.33.10	Kelembagaan Dan Pengembangan Strategi Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kegiatan yang sesuai dengan strategi pembangunan pembah- aruan	100% 13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
1	4.404.33.10.01	Penelitian/Kajian/ Studi/ Analisa	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
2	4.404.33.10.02	Kelembagaan Dan Pengembangan Strategi Pembangunan	Jumlah dokumen hasil kajian	13 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	23,08
3	4.404.33.10.03	Kelembagaan Dan Pengembangan Strategi Pembangunan	Jumlah dokumen hasil kajian	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
XI	4.404.33.11	Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kerjasama	Persentase kegiatan kegiatan	100% 12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33
1	4.404.33.11.01	Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kerjasama	Jumlah dokumen hasil kajian	12 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	8,33

Catatan : 4. karena adanya perubahan indikator satuan pada RENCANA sehingga hasil capaian kinerja tidak dapat dikumulasi

Catatan penting :

- Dari tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan, Program Pengembangan data/informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga akhir periode Renstra tercapai 100%.
- Berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang kelitbangan Program penelitian dan pengembangan terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan, namun yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 masih 10 (sepuluh) kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata 90%. Hal ini disebabkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan hanya yang bersifat prioritas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Malang, Perangkat Daerah se-Kabupaten Malang, Kecamatan se-Kabupaten Malang, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 pasal 4, disebutkan bahwa kelitbangan terdiri atas :

- a. Kelitbangan Utama;
- b. Kelitbangan Pendukung.

Dimana kelitbangan tersebut melalui tahapan : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam pasal 5 Permendagri nomor 17 tahun 2016, disebutkan bahwa Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Pengembangan;
- d. Perencanaan;
- e. Penerapan;
- f. Pengoperasian; dan

g. Evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. Penguatan ketatalaksanaan;
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
- d. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
- e. Fasilitasi inovasi daerah;
- f. Pengembangan basis data kelitbangan;
- g. Penguatan kerjasama kelitbangan; dan
- h. Pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan kegiatan penunjang antara lain melalui:

- a. fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan desiminasi;
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan;
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan;
- d. Supervise dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian;
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Kinerja pelayanan Badan penelitian dan pengembangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti;
2. Persentase Hasil Kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah Bereputasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	ISK	Target Rencana SP2D					Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018		Tahun 2020	Tahun 2021		
1	Ekselon II : Lama	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase hasil kegiatan kolaborasi yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	-	-	50%	-	-	-	60%	-	-	-	-	
2	Persentase Program/Kegiatan Perunggalan Inovasi Daerah Baru	-	-	-	34%	34%	34%	-	34%	34%	34%	-	
3	Persentase Hasil Kegiatan yang ditindaklanjuti	-	-	-	33%	34%	34%	-	34%	34%	34%	-	
4	Persentase Hasil Kegiatan yang berhasil dipublikasikan di jurnal Unich Bereputasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Ekselon III :													
Persentase Pemenuhan Operasional													
Perkantoran													
1	Ekselon IV: Jumlah register surat masuk dan surat keluar	-	-	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	1700 buah	
2	Jumlah Pengaduan Isitrik Air minum/Berair, reklamasi/kegiatan lain	-	-	12 selering	12 rekamng	12 selering	12 rekamng	12 selering	12 rekamng	12 selering	12 rekamng	12 selering	
3	Jumlah Pengaduan Pengaduan Admistratif	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
4	Jumlah Pengaduan Xol esehatan	-	-	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	80 jenis	
5	Jumlah pengaduan sara tula haster	-	-	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	
6	Jumlah penyediaan barang cetak dan pengoperasian	-	-	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	
7	Jumlah eksemplar bahan bayan yang	-	-	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	24 esemplar	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	-	-	200 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	200 kali	25 kali	50 HOK	90 HOK	90 HOK			
2	Jumlah pengisian daya kabel daerah	-	-	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK	90 HOK			
3	Jumlah pemungutan dana dalam daerah	-	-	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK	150 HOK			
4	Jumlah pemungutan pajak perantara	-	-	5 kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok	9 jasa kelompok			
5	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	Ekselon III: Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja Aparatur	-	-	12 jenis	13 jenis	13 jenis	12 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	12 jenis	12 jenis			
7	Ekselon IV: Jumlah pembelian gedung kantor yang tersedia	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
8	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	-	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit			
9	Jumlah ketersediaan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	-	-	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit	27 unit			
10	0%	-	-	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%			
11	Ekselon III: Presentase penunjang kerja aparatur	-	-	0 apel	08 stel	08 stel	08 stel	08 stel	0 stel	08 stel	08 stel	08 stel	08 stel			
12	Ekselon IV: Jumlah penyediaan pakaian oleh raga/batik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
13	Ekselon III: Presentase acungkatun lapasnas regional di penunjang daerah	-	-	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang			
14	Ekselon IV: Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15	Ekselon III: Presentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja pengikat daerah	-	-	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan			
16	Ekselon IV: Jumlah laporan kinerja (LEJ-1P) sesuai kriteria pengikat daerah	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
17	Jumlah dokumen laporan keuangan perencanaan selama satu tahun	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Target 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3	Jumlah dokumen keuangan saat tahun.	-	-	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku	3 buku			
V	Kaselon III: Pencapaian Informasi penelitian dan pengembangan yang terapan	-	-	44%	46%	48%	50%	44%	46%	48%	50%			
1	Kaselon IV: Jumlah dokumen informasi penelitian dan pengembangan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			
VII	Kaselon III: Prosentase program atau kegiatan inovatif daerah	-	-	78%	79%	80%	81%	78%	79%	80%	81%			
1	Kaselon IV: Jumlah dokumen evaluasi Roadmap Bida	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
2	Jumlah dokumen inovasi Government Award	-	-	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
3	Jumlah Inovator	-	-	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
VIII	Kaselon III: Pencapaian hasil kegiatan kelibnetasan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemintah Melung	-	-	78%	79%	80%	81%	78%	79%	80%	81%			
1	Kaselon IV: Jumlah satuan kerja bagian/pejabat/instansi/medes dan terapan sosial Budaya	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			
2	Jumlah satuan kerja bagian/pejabat/instansi/medes dan terapan sosial politik	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			
3	Jumlah satuan kerja bagian/pejabat/instansi/medes dan terapan Kerjasama	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			
IX	Kaselon III: Pencapaian hasil kegiatan kelibnetasan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemintah Melung	-	-	78%	79%	80%	81%	78%	79%	80%	81%			
1	Kaselon IV: Jumlah satuan kerja bagian/pejabat/instansi/medes dan terapan Kerjasama	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen			

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja SKPD					Realisasi Capaian					Catatan Anatilis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/studi/ analisa dan terapan keuangan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
3	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/studi/ analisa dan terapan lingkungan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
X	Ekselon III: Perencanaan hasil kegiatan keahlihan yang sesuai dengan strategi pengembangan Pemkab Malang	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
1	Ekselon IV: Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan pemerintahan, umum dan desa	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
2	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan aparatur pemerintah dan pelayanan publik	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
3	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan ekonomi daerah dan kerajinan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
XI	Perencanaan hasil kegiatan keahlihan yang sesuai dengan strategi pengembangan Pemkab Malang	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
1	Ekselon IV: Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan lingkungan hidup	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
2	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan teknologi tepat guna	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
3	Jumlah usulan judul kajian/ penelitian/ studi/ analisa dan terapan pengembangan kawasan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang memiliki tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan fungsi kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Malang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :

- a. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota;
- g. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota;
- h. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
- j. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
- l. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
- m. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing;
- n. Pembinaan UPT; dan

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan", sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada Misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi", Sasaran ke 3 "Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik", maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota, melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten/kota, memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/kota, memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota, melaksanakan administrasi kelitbangan, mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi penelitian/pengkajian dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang yang membantu Bupati Malang dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penelitian atau pengkajian dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian/pengkajian tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian dan terpenuhinya sumber daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan.

2. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga penelitian.
4. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Pengkajian tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam peningkatan kualitas produk penelitian/pengkajian adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada masih belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana yang ada belum memadai;
4. Belum adanya tenaga peneliti.

Threats (tantangan) :

1. Tingkat kesejahteraan mayoritas masyarakat yang berlatar belakang petani dan buruh masih rendah;
2. Masih adanya dualisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di instansi lain;
3. Sulitnya berkoordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Belum adanya pemahaman yang sama tentang peranan BALITBANG sebagai lembaga penghasil Rekomendasi Kebijakan;
5. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

Opportunities (peluang) :

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan;
2. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Banyak Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti / Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja;
4. Tersedianya produk hasil penelitian lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan acuan untuk pengumpulan data dan informasi yang valid;
5. Kondisi Kabupaten Malang yang kondusif.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan Misi, untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan

manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Sumber Daya manusia dibidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Tercukupinya dukungan pendanaan kegiatan Penelitian/kajian secara proporsional guna mencukupi kebutuhan SKPD terhadap hasil penelitian/kajian serta pengembangan;
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Adanya jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga litbang;
5. Adanya penghargaan terhadap hasil-hasil litbang.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan penelitian dan pengembangan yang lebih baik dalam menunjang perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, dimana pada proses penyusunan Renja dimaksud salah satunya memperhatikan analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan disesuaikan dengan rancangan awal yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2016-2021. Perubahan program pada Renstra dimaksud telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Selain itu dengan telah dilakukan evaluasi Indikator Kinerja Utama yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap semua perangkat daerah maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menyesuaikan program kerjanya agar tetap sesuai dan mendukung apa yang menjadi sasaran RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan setelah dilaksanakan analisa kebutuhan dan ketentuan mengenai nomenklatur program kegiatan, maka untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihasilkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur utamanya dalam berpakaian dinas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Perlu ditambahkan 1 (satu) program/kegiatan yakni Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Hari-Hari Tertentu dan Kelengkapannya
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang semula hanya ada satu kegiatan yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan formal perlu ditambahkan 2 (dua) kegiatan lagi yaitu kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop bagi staf dan Pelatihan fungsional peneliti
3. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

- ditambahkan Kegiatan Pengembangan dan sesiminasi pada Bidang Lingkungan Hidup, Pengembangan Bidang Tehnologi Tepat Guna, Perckayasaan Bidang Tehnologi Tepat Guna dan Evaluasi Kebijakan
4. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya, Pengembangan Bidang Sosial Politik, Pengembangan Bidang Kemasyarakatan dan Evaluasi Kebijakan
 5. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi perlu ditambahkan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pengembangan Bidang Keuangan, Pengembangan Bidang Investasidan Evaluasi Kebijakan
 6. Pada Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan perlu ditambahkan Kegiatan Evaluasi Bidang Pemerintahan Umum dan Desa, Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Evaluasi Bidang Otonomi Daerah dan Kerjasamadan Evaluasi Kebijakan
 7. Berkaitan dengan Program Peningkatan Inovasi Dacrah, yang semula hanya ada satu kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA, karena kegiatan penyusunan dokumen roadmap SIDA sudah dilakukan maka perlu adanya implementasi dari kegiatan penyusunan roadmap SIDa sebagai tindak lanjut dari Program Peningkatan Inovasi Daerah sehingga kegiatannya dirubah menjadi Kegiatan Implementasi SIDa dan perlu ditambahkan 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Inovasi Goverman Award dan Kegiatan Inotek
 8. Beberapa program dan kegiatan lain yang ada masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan untuk tetap dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan kegiatan kelitabangan pendukung yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi.

Rancangan awal Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Malang, terdiri dari 11 (sebelas) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Namun setelah dilakukan analisa kebutuhan sesuai dengan RPJMD tahun 2020 maka berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	Program Pelayanan Administrasi	Bulohwang Kab. Malang	Tingkat kelengkapan administrasi	100%	6.200.000,00	Program Pelayanan Administrasi	Bulohwang Kab. Malang	Tingkat kelengkapan administrasi	100%	7.841.942.075,00	
1	Perencanaan Jasa Kerja Masyarakat	Malang Kab.	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.700 Surat	7.986.000,00	Perencanaan Perencanaan Perencanaan Jasa Kerja Masyarakat	Malang Kab.	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.700 Surat	6.000.000,00	
2	Perencanaan Jasa Komunikasi, dan Layanan Masyarakat	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah panggilan telepon selama 9000-20000	12 bulan	5.271.000,00	Perencanaan Jasa Komunikasi, dan Layanan Masyarakat	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah panggilan telepon selama 9000-20000	12 bulan	3.000.000,00	
3	Perencanaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengisian administrasi	192 Orang	138.397.500,00	Perencanaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengisian administrasi	192 Orang	233.545.000,00	
4	Perencanaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengguna kebersihan	1 OB	23.713.000,00	Perencanaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengguna kebersihan	1 OB	21.600.000,00	
5	Perencanaan Alat Tulis Kantor	Malang Kab.	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	80 jenis	30.398.000,00	Perencanaan Alat Tulis Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	80 jenis	45.634.720,00	
6	Perencanaan Barang Elektronik dan Peralatan Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengadaan barang elektronik dan cetak dan pengisian	7 jenis	70.581.000,00	Perencanaan Barang Elektronik dan Peralatan Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengadaan barang elektronik dan cetak dan pengisian	7 jenis	58.800.500,00	
7	Perencanaan Kompetisi Inovasi Liris/Perencanaan Anggaran Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengisian formulir pendaftaran Liris/Perencanaan Anggaran Kantor	6 jenis	6.847.005,00	Perencanaan Kompetisi Inovasi Liris/Perencanaan Anggaran Kantor	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah pengisian formulir pendaftaran Liris/Perencanaan Anggaran Kantor	6 jenis	5.650.500,00	
8	Perencanaan bahan bahan dan peralatan perundang undangan	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah ekemplar bahan bahan yang dibeli	24 jenis	5.650.000,00	Perencanaan bahan bahan dan peralatan perundang undangan	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah ekemplar bahan bahan yang dibeli	24 jenis	5.500.000,00	
9	Perencanaan meubelair dan peralatan lainnya	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah meubelair yang disediakan	25 OHK	60.500.000,00	Perencanaan meubelair dan peralatan lainnya	Bulohwang Kab. Malang	Jumlah meubelair dan peralatan yang disediakan	25 OHK	60.500.000,00	

RMG

Hasil Analisis Kebutuhan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Keburukan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Rapat rapat koordinasi dan koordinasi keluar daerah	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengurusan dinas keluar daerah	92 ORK	190.585.500,00	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi keluar daerah	Baliwang Kab. Maling	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas keluar daerah	92 ORK	175.845.150,00	
11	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dalam daerah	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengurusan dinas dalam daerah	150 ORK	48.640.200,00	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Baliwang Kab. Maling	Jumlah aparatur yang melaksanakan dinas dalam daerah	150 ORK	147.735.000,00	
12	Program Pengurusan Barisan dan Pemasangan Aparatur	Baliwang Kab. Maling	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik		205.520.000,00	Program Pengurusan Barisan dan Pemasangan Aparatur	Baliwang Kab. Maling	Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik		170.585.460,00	
13	Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah perawatan gedung kantor yang disediakan	13 unit	97.135.500,00	Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah perawatan gedung kantor yang disediakan	13 unit	97.135.500,00	
14	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	1 jenis	47.450.000,00	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	1 jenis	25.795.570,00	
15	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	2 Unit	40.671.000,00	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	2 Unit	32.052.040,00	
16	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	27 jenis	17.998.500,00	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	27 jenis	14.640.350,00	
17	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	68 sudi	24.640.000,00	Pembelian Peralat/Berkala Gedung Kantor	Baliwang Kab. Maling	Jumlah pengadaan alat yang diperlukan	68 sudi	24.640.000,00	Hasil analisis kebutuhan

No.	RENCANA					Hasil Analisa Kebutuhan						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	%/ Jumlah (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Costing Pening	
18	Bantuan Teknis/Workshop	Balibang Kab. Malang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKPD)	7 buku	55.825.000,00	Bantuan Teknis/Workshop	Balibang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diserahkan kepada pemerintah	7 buku	17.513.994,00	Hasil analisa kebutuhan	
19	Program Penunjang Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Balibang Kab. Malang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKPD)	3 buku	15.030.000,00	Program Penunjang Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diserahkan kepada pemerintah	3 buku	7.515.790,00	Hasil analisa kebutuhan	
20	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKPD)	2 buku	2.574.000,00	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Balibang Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diserahkan kepada pemerintah	2 buku	2.574.000,00	Hasil analisa kebutuhan	
21	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKPD)	3 buku	379.750.250,00	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diserahkan kepada pemerintah	3 buku	303.140.510,00	Hasil analisa kebutuhan	
22	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKPD)	2 buku	256.300.000,00	Program Penunjang Pengembangan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja yang diserahkan kepada pemerintah	2 buku	256.300.000,00	Hasil analisa kebutuhan	

No	EKSPD					Rincian Anggaran Belanja							Cicilan Penting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program/kegiatan	Kelompok	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Page. Investasi (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)			
1	dan Pengembangan												
23	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Hidup	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Hidup	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
24	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
25	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
26	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
27	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Sosial Politik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
28	Penelitian / kajian / studi / Analisa dan Terapan Bidang Kesehatan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisa dan Terapan Bidang Kesehatan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.521.300,00			
29	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan												
30	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan												

No	PKPD					Hasil Analisa Sebutan						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keuangan					Investasi						
	Keuangan / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikasi (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kelembahan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
29	Keuangan / Kegiatan / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Ekonomi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.686.800,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Ekonomi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.686.800,00	Alokasi PUG	
30	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Keorganisasian	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Keorganisasian	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	Alokasi PUG	
31	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Investasi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.171.800,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Investasi	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.171.800,00	Alokasi PUG	
32	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Kab. Malang	Cakupan Kajian/pembinaan dan pengembangannya	3 dokumen	85.591.000,00	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Kab. Malang	Cakupan Kajian/pembinaan dan pengembangannya	3 dokumen	85.591.000,00	Alokasi PUG	
33	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Aparatur Pemerintah dan Penyelenggaraan Publik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Aparatur Pemerintah dan Penyelenggaraan Publik	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	Alokasi PUG	
34	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Otonomi Daerah dan Keuangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis dan Tinjauan Bidang Otonomi Daerah dan Keuangan	Kab. Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	Alokasi PUG	
XI	Program Penyelenggaraan Inovasi Daerah		Cakupan Ketersediaan Data/Informasi sebagai Penunjang Peningkatan Peningkatan Daerah		319.650.000,00	Program Penyelenggaraan Inovasi Daerah		Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah		319.650.000,00		

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikasi (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Kab Malang	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 Dokumen	110.660.000,00	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Kab Malang	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 Dokumen	110.660.000,00		
36	Inovasi Government Award	Kab Malang	jumlah dokumen inovasi government award	1 Dokumen	44.000.000,00	Inovasi Government Award	Kab Malang	jumlah dokumen inovasi government award	1 Dokumen	44.000.000,00		
37	Inovasi	Kab Malang	jumlah inovator	1 Dokumen	165.000.000,00	Inovasi	Kab Malang	jumlah inovator	1 Dokumen	165.000.000,00		
JUMLAH					2.824.421.545,00	JUMLAH						2.824.421.545,00

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, telah dilakukan pengumpulan usulan kegiatan dari SKPD dan bukan merupakan hasil dari musrenbang, sehingga untuk tabel 2.4 yaitu Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2020, tidak dapat disajikan. (Nihil).

Tabel 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2020, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah : Urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang menjadi acuan adalah : Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan, Program Penelitian dan Pengembangan.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan yang responsif gender 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen, yang meliputi kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur, Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pengembangan Kawasan, Penelitian/kajian/Studi/Analisa Bidang Sosial, serta Penelitian/Kajian/Studi/Analisa Bidang Pemerintahan.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan penelitian Dan Pengembangan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasifaktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan

akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi kedua RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yaitu memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi adalah : Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan

Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;

- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;

e. SMART :

(S) <i>Specific</i>	: bersifat khusus/khas dan simple/ sederhana
(M) <i>Measurable</i>	: dapat diukur
(A) <i>Attainable/Achievable</i>	: dapat dijadikan/dikerjakan
(R) Rasional	: bersifat logis/masuk akal
(T) <i>Time Related</i>	: dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatkan hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarnya yakni :

1. Persentase hasil kajian yang berhasil ditindaklanjuti dan
2. persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasil klithangan yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan" terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yaitu "Tertwujudnya Kabupaten Malang yang MADEF MANTEB" sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaiian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan;
26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;

32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
36. Inovasi Governman Award;
37. Inotek.

Adapun Rancangan Rencana Kerja pada tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MALU TAHUN 2021
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	2	3	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Malu Rencana Tahun 2021			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Sektor Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
4.04.4.04.01.01.11	Uraian: Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, Administrasi, Kelembagaan, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan Pemeliharaan	Indikator Kinerja Program/kegiatan				APBD				
4.04.4.04.01.01.11	Program: Administrasi	Tingkat Kelembagaan	Baliwangda	100%	784.042.575,00	APBD		100%	784.042.575,00	
4.04.4.04.01.01.11	Subprogram: Administrasi	Kelembagaan	Baliwangda	1.700 Survei	6.000.000,00	APBD		1.700 Survei	6.000.000,00	
4.04.4.04.01.01.11	Mengukur	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Baliwangda	12 bulat	3.000.000,00	APBD		12 bulat	3.000.000,00	
4.04.4.04.01.01.11	Program: Administrasi	Jumlah pejabat pengelola administrasi keorganisasian	Baliwangda	102 OB	253.543.000,00	APBD		102 OB	253.543.000,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pemeliharaan Jasa Kelembagaan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Baliwangda	1 OB	21.600.000,00	APBD		1 OB	21.600.000,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pemeliharaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Baliwangda	80 jenis	46.534.720,00	APBD		80 jenis	46.534.720,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pemeliharaan Barang	Jumlah pengadaan barang cetak dan pengalihan	Baliwangda	7 jenis	59.605.520,00	APBD		7 jenis	59.605.520,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pemeliharaan Komponen Listrik/Pemrograman Perangkat Keras	Jumlah pengadaan komponen listrik/ pemrograman perangkat keras	Baliwangda	9 jenis komponen	5.660.500,00	APBD		9 jenis komponen	5.660.500,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pengadaan Kantor	Jumlah elementor badan hukum yang dibuat	Baliwangda	24 jenis	5.560.000,00	APBD		24 jenis	5.560.000,00	
4.04.4.04.01.01.11	Pengadaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Baliwangda	25 OKR	60.563.800,00	APBD		25 OKR	60.563.800,00	
4.04.4.04.01.01.11	Bantuan sosial dan beasiswa ke luar daerah	Jumlah penerima yang melaksanakan dinas ke luar daerah	Baliwangda	90 OKR	175.895.135,00	APBD		90 OKR	175.895.135,00	

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Melebihi Rencana Tahun 2021			Keterangan
			Luas	TARGET Capaian Kinerja	Keluaran Dana/ Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET Capaian Kinerja	Keluaran Dana/ Pagu Indikator (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.04.4.04.01.01.15	Begal-rapat koordinasi dan koordinasi ke dalam daerah	Jumlah rapat yang dilaksanakan diwas ke dalam daerah	Bulitbangda	150 ORK	147.753.000,00	APBD		150ORK	136.702.000,00		
4.04.4.04.01.02	Program pelaksanaan urusan dan koordinasi	Cakupan urusan dan program yang dikelola dengan baik	Bulitbangda	100%	170.000.460,00	APBD		100%	136.702.000,00		
4.04.4.04.01.02.01	Aparatur	Jumlah Pegawai yang terdapat	Bulitbangda	12 jenis	97.130.500,00	APBD		13 unit	0		
4.04.4.04.01.02.14	Peningkatan kinerja/teknik pengurusan	Jumlah yang dilaksanakan	Bulitbangda	1 jenis	25.745.000,00	APBD		1 jenis	52.159.000		
4.04.4.04.01.02.15	Penelitian/teknik pengurusan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Bulitbangda	5 unit	32.552.000,00	APBD		5 unit	44.738.000		
4.04.4.04.01.02.20	Penelitian/teknik pengurusan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Bulitbangda	27 unit	14.808.250,00	APBD		27 unit	19.765.000		
4.04.4.04.01.02.02	Penelitian/teknik pengurusan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Bulitbangda	100%	24.610.000,00	APBD		100%	24.610.000,00		
4.04.4.04.01.02.03	Penelitian/teknik pengurusan	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	Bulitbangda	68 unit	24.240.000,00	APBD		0 unit	24.610.000		
4.04.4.04.01.04	Program Pengantar Kegiatan Sumbah Daya Aparatur	Cakupan pemberian kompetensi sumber daya Aparatur	Bulitbangda	13 Orang	80.300.000,00	APSD		11 Orang	80.000.000		
4.04.4.04.01.04.01	Perubahan dan Rekrutasi Formasi/ Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan formal/ informal	Bulitbangda	40 Orang	88.300.500,00	APBD		40 Orang	88.300.500		
4.04.4.04.01.04.02	Budidaya Teknis/Wharalogs	Jumlah aparatur yang mendapat Pelatihan teknis/wharalogs	Bulitbangda	100%	27.947.500,00	APBD		100%	81.420.000,00		
4.04.4.04.01.05	Program peningkatan sistem pelayanan sipadan sipada dan keuangan	Cakupan sipadan sipada dan keuangan yang dilaksanakan	Bulitbangda	7 bulat	17.253.800,00	APBD		7 bulat	61.307.000		
4.04.4.04.01.05.01	Pengurusan laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SIPD	Jumlah laporan laporan kinerja yang disusun secara berkala yang berkaitan dengan SIPD	Bulitbangda	7 bulat	17.253.800,00	APBD		7 bulat	61.307.000		

KODE	Uraian/Deskripsi Uraian Kegiatan/Keahlian	Indikator Kinerja Program/Keahlian	Rencana Tahun 2020					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021					Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keluaran Dana/Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Pening	Target Capaian Kinerja	Keluaran Dana/Pagu Indikator (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.04.4.04.01.05.02	Pengumpulan laporan keuangan, pernyataan	Jumlah laporan keuangan	Bulanan	2 buku	2.574.000,00	APBD		2 buku	2.831.000				
4.04.4.04.01.05.04	Pengumpulan laporan keuangan oleh forum	Jumlah dokumen laporan oleh forum	Bulanan	3 buku	7.899.750,00	APBD		3 buku	17.162.000				
4.04.4.04.01.05	Program penelitian, pengabdian dan pengabdian masyarakat	Catatan keterselebaran karya ilmiah sebagai pertanggung jawaban peneliti	Bulanan	100%	503.143.310,00	APBD		100%	379.750.250,00				
4.04.4.04.01.06.01	Pengumpulan, pengabdian dan pengabdian masyarakat	Jumlah dokumen pertanggung jawaban	Bulanan	2 dokumen	318.143.310,00	APBD		2 dokumen	379.750.250,00				
4.04.4.04.01.07	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Cakupan kajian/penelitian dan pengabdian masyarakat	Bulanan	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00				
1.04.4.04.01.07.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian	Bulanan	3 dokumen	85.331.500,00	APBD		3 dokumen	85.331.500,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.07.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulanan	3 dokumen	85.690.000,00	APBD		3 dokumen	85.690.000,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.07.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulanan	3 dokumen	85.286.500,00	APBD		3 dokumen	85.286.500,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.08	Pengembangan Komunitas	Cakupan kajian/penelitian dan pengabdian masyarakat	Bulanan	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00				
4.04.4.04.01.08.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulanan	3 dokumen	84.535.000,00	APBD		3 dokumen	84.535.000,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.08.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulanan	3 dokumen	85.712.000,00	APBD		3 dokumen	85.712.000,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.08.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis / Survei / Pengabdian Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulanan	3 dokumen	86.053.000,00	APBD		3 dokumen	86.053.000,00	Akumulatif PUG			
4.04.4.04.01.09	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang	Cakupan kajian/penelitian dan pengabdian masyarakat	Bulanan	100%	256.300.000,00	APBD		100%	256.300.000,00				

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Perkiraan Awal Rencana Tahun 2021			Keterangan			
			1	2	3	4	5	6	7	8		9		
1	Ekonomi, Keuangan dan Investasi	Pengembangan												
4.04.4.04.01.09.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	3	dokumen	84.882.800,00	APBD		3	dokumen	84.882.800,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	5	dokumen	85.441.400,00	APBD		3	dokumen	85.441.400,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.09.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	5	dokumen	86.171.800,00	APBD		3	dokumen	86.171.800,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.10	Keperluan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Takipar kajian/pemeliharaan dan jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	100%		200.300.000,00	APSD		100%		200.300.000,00			
4.04.4.04.01.10.01	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang pemerintahan umum dan zone	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	3	dokumen	85.501.000,00	APBD		3	dokumen	85.501.000,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.10.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang pemerintah Pemerintahan dan Pelanggaran Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	3	dokumen	85.395.400,00	APBD		3	dokumen	85.395.400,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.10.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang pemerintah daerah dan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Bulitbangda	3	dokumen	85.404.200,00	APBD		3	dokumen	85.404.200,00	Akomodir PUG		
4.04.4.04.01.11	Program Pemeliharaan Investasi Daerah	Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Investasi Daerah	Bulitbangda	100%		319.660.000,00	APBD		100%		319.660.000,00			
4.04.4.04.01.11.01	Implementasi SIDA (Sistem Informasi Daerah) Investasi Government Asset	Implementasi SIDA (Sistem Informasi Daerah) jumlah dokumen investasi Government asset	Bulitbangda	1	dokumen	110.000.000,00	APBD		1	dokumen	110.000.000,00			
4.04.4.04.01.11.02	Investasi Government Asset	Investasi Government Asset	Bulitbangda	1	dokumen	44.000.000,00	APBD		0	dokumen	44.000.000,00			
4.04.4.04.01.11.03	Investasi	jumlah investasi	Bulitbangda	1	dokumen	105.000.000,00	APBD		0	dokumen	105.000.000,00			
		JUMLAH				2.624.421.545,00					2.629.961.250,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan dalam penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk yang berupa hasil penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a, Permendagri nomor 17 tahun 2016.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan *"penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan"* terhadap program dan kegiatan guna mendukung terwujudnya sasaran RPJMD Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEH MANETEP"* sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2020 terdiri dari :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan;
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasayarakatan;

9. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi;
10. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan;
11. Program Peningkatan Inovasi Daerah.

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu;
17. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
18. Bimbingan Teknis;
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengumpulan Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan;
23. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Lingkungan Hidup;
24. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Teknologi Tepat Guna;
25. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Pengembangan Kawasan

26. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Bidang Sosial Budaya;
27. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Sosial Politik;
28. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Kemasyarakatan;
29. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang ekonomi;
30. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang Keuangan;
31. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan Analisa bidang investasi;
32. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan dan Terapan Bidang pemerintahan umum dan desa;
33. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik;
34. Penelitian/Kajian/Studi/Analisa dan Terapan bidang Otonomi Daerah dan Kerjasama;
35. Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah);
36. Inovasi Governan Award;
37. Inotek.

Rumusan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

KODE	Uraian/Hidang Uraian Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Sumber Dana	Keterangan
			Indikasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.04.4.04.01.01	Urusan : Operasi Daerah, Pemertahanan Urusan, Administrasi, Keuangan Daerah, Pertanahan Daerah, Kependidikan dan Persandian Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Halibatangda	100%	784.942.675,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Halibatangda	1.760 Surat	6.000.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Nomor Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayarkan selama satu tahun	Halibatangda	12 bulan	3.000.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	Halibatangda	192 DR	253.545.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.08	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Halibatangda	1 DR	21.600.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.10	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Halibatangda	85 jenis	46.634.720,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.11	Pengadaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah penyediaan barang cetak	Halibatangda	7 jenis	58.809.620,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.12	Pengadaan Komputer Instalasi Listrik/Pertanahan Banguan Kantor	Jumlah penyediaan komputer instalasi listrik/ Pemasangan Bangunan Kantor	Halibatangda	0 jenis komponen	5.659.500,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.15	Pengadaan Bahan Deterjan dan Peralatan Puncung, undangan	Jumlah eksemplar bahan besan yang disediakan	Halibatangda	24 jenis	5.500.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.17	Pengadaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Halibatangda	25 DKK	60.563.800,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat yang diselenggarakan dinas ke luar daerah	Halibatangda	90 DKK	175.895.135,00	APBD			
4.04.4.04.01.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat yang diselenggarakan dinas ke dalam daerah	Halibatangda	150 DKK	147.735.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.02	Program peningkatan sarana dan	Catupan sarana dan prasarana	Halibatangda	100%	170.685.460,00	APBD			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Keterangan
			Lokasi	TARGET Capaian Kinerja	Keberhasilan Dana/Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.04.4.04.01.02.09	pasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor	yang berfungsi dengan baik	Baliurangda	13 jenis	97.135.500,00	APBD		
4.04.4.04.01.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Baliurangda	1 jenis	25.749.570,00	APBD		
4.04.4.04.01.02.16	Pemeliharaan rutin/berkala berurusan dinas/operasional	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pembinaan	Baliurangda	5 Unit	32.952.040,00	APBD		
4.04.4.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Baliurangda	27 Unit	14.848.350,00	APBD		
4.04.4.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah penyediaan peralatan Dinas	Baliurangda	100%	24.640.000,00	APBD		
4.04.4.04.01.03.01	Pengadaan Pakian seragam hari-hari kerja dan kelengkapan	Cakupan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Aparatur	Baliurangda	100%	168.305.500,00	APBD		
4.04.4.04.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan formal/fungsional	Baliurangda	11 Orang	80.000.000,00	APBD		
4.04.4.04.01.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal/Fungsional	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal/fungsional	Baliurangda	40 Orang	86.305.500,00	APBD		
4.04.4.04.01.04.02	Bimbingan Teknis/Workshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis/workshop	Baliurangda	100%	27.847.600,00	APBD		
4.04.4.04.01.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan anggaran	Cakupan laporan kinerja dan anggaran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akurat	Baliurangda	7 buku	17.613.860,00	APBD		
4.04.4.04.01.05.02	Perencanaan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Baliurangda	2 buku	2.574.000,00	APBD		
4.04.4.04.01.05.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Baliurangda	3 buku	7.659.740,00	APBD		
4.04.4.04.01.06	Program pemusatan, pengolahan dan penyusunan informasi Penelitian dan Pengembangan	Cakupan keterselesain data/informasi kelengkapan sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah	Baliurangda	100%	303.140.310,00	APBD		

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi (Rp.)	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
4.04.4.04.01.06.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen perencanaan	Dalibangka	2 dokumen	303.140.310,00	APBD			
4.04.4.04.01.07	Program Penelitian dan Pengembangan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Dalibangka	100%	256.300.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.07.01	Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.321.560,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.07.02	Bidang Lingsung Halat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.690.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.07.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.288.500,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.08	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang Pengembangan Kawasan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Dalibangka	100%	256.300.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.08.01	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	2 dokumen	84.535.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.08.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.712.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.08.03	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang Sosial Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	86.053.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.09	bidang Kearifan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Dalibangka	100%	256.300.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.09.01	Investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	84.686.800,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.09.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.441.400,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.09.03	bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	86.171.800,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.10	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang investasi	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	Dalibangka	100%	256.300.000,00	APBD			
4.04.4.04.01.10.01	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.591.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.10.02	bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.305.000,00	APBD	Akronis PUG		
4.04.4.04.01.10.02	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	Dalibangka	3 dokumen	85.305.000,00	APBD	Akronis PUG		

KODE	2	3	Rencana Tahun 2020				8
			4	5	6	7	
1	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Latensi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pago Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Keterangan
4.04.4.04.01.10.03	Penelitian / Karya / Studi / Analisis bidang ekonomi daerah dan kerjasama Program Peningkatan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kerja	Balibangda	3 dokumen	65.101.000,00	APBD	Akronis PUG
4.04.4.04.01.11		Cakupan Ketersediaan Data/Informasi Inovasi Daerah	Balibangda	100%	319.660.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.01	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Halibangda	1 dokumen	110.660.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.02	Inovasi Governance Award	Jumlah cakupan inovasi governance award	Balibangda	1 dokumen	44.000.000,00	APBD	
4.04.4.04.01.11.03	Inovasi	Jumlah Inovator	Balibangda	1 dokumen	165.000.000,00	APBD	
		Jumlah Inovator	Balibangda	1 dokumen	2.824.421.545,00	APBD	

Adapun rencana serapan per Triwulan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020

No	Urusan/Undang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (%)					Ketersangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi (Rp.)	I	II	III	IV	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pertanahan Program Administrasi Perkarawanan	Tingkat kelancaran administrasi pemerintahan Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	100%	784.942.675,00	27,56	27,70	26,10	18,64		
1.1	Penyetaraan Jasa Surat Menyurat	Jumlah rekamers surat masuk dan surat keluar	1.700 Ekar	6.080.000,00	20,00	21,13	26,67	30,00		
1.2	Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekamers telepon yang dibayarkan selama satu tahun	12 bulan	3.000.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
1.3	Penyetaraan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah peksab pengisaha administrasi keuangan	102 OR	253.545.000,00	29,58	29,58	29,58	11,26		
1.4	Penyetaraan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	1 OS	21.600.000,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
1.5	Penyetaraan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	90 jenis	46.634.720,00	28,98	29,00	19,87	22,16		
1.6	Penyetaraan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan pengandaan	7 jenis	58.809.520,00	35,58	34,90	14,42	15,11		
1.7	Penyetaraan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis Komponen	5.658.500,00	29,04	29,04	20,83	21,09		
1.8	Penyetaraan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan	Jumlah eksensipar bahan baku yang dibeli	24 jenis	5.500.000,00	30,00	30,00	20,00	20,00		
1.9	Penyetaraan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	25 ORK	60.563.800,00	26,38	29,15	22,21	22,06		
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan dinas ke luar daerah	50 ORK	175.095.135,00	26,61	24,87	26,53	22,00		
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah aparat yang melaksanakan dinas ke dalam daerah	150 ORK	147.735.000,00	22,88	24,37	28,13	24,53		
2	Program penggabungan sarana dan	Cakupn sarana dan pnsarana yang	100%	170.685.460,00	12,44	53,81	25,31	8,43		

No	Uraian/Isi dari Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Tingkat Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan %				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	1. persiapan Aparatur	bertugas dengan baik										
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan	13 jenis	97.135.500,00	0,00	72,06	27,94	0,00				
2.2	Penelitian ruang/berkas gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang menyediakan pelayanan	1 jenis	25.749.570,00	25,74	24,63	24,63	24,99				
2.3	Penelitian rutin/berkas beredasi dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terdapat pemeliharaan	5 Unit	32.952.040,00	32,04	34,77	19,81	13,37				
2.4	Perencanaan rutin/berkas peralihan gedung kantor	Jumlah peralihan gedung kantor yang terdapat pemeliharaan	27 Unit	14.548.350,00	27,27	27,27	21,55	23,91				
3	Program Penyelidikan Daerah Aparatur	Penelitian Aparatur	100%	24.010.000,00	0,00	59,42	40,58	0,00				
3.1	Pengadaan Pakuan seragam hari-hari tertentu dan kerengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Seri)	68 unit	24.640.000,00	0,00	59,42	40,58	0,00				
4	Program Penyelidikan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cadangan pemertahan kompetensi	100%	168.305.500,00								
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Kurnia/Fungsional	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan/kurnia/fungsional	11 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4.2	Hubungan Teknis/Whitelabing	Jumlah aparat yang mendapat hubungan teknis/whitelabing	40 Orang	88.305.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kerangka	Cadangan laporan secara dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akurat	100%	27.847.600,00	20,67	30,10	10,41	38,81				
5.1	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akurat	7 buku	17.613.860,00	32,68	32,98	16,46	17,87				
5.2	Penyusunan laporan keuangan akhir semester	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 buku	2.574.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
5.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2 buku	7.659.740,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
6	Program pemertahan, Pengalihan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Cadangan ketersediaan data/informasi kelengkapan sebagai penunjang pemertahan/pengalihan desah	100%	303.140.310,00	15,00	35,00	40,00	10,00				
6.1	Pengumuman, Pengalihan	Jumlah dokumen pemertahan	2 dokumen	303.140.310,00	15,00	35,00	40,00	10,00				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Triwulan (Rp)					Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Keuntungan Dana/Pagu Indikator (Rp.)	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	dan penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan									
7	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
7.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.221.500,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
7.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.690.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
7.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Pengembangan Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.288.500,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
8	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Komunitas	Cakupan kajian/genelral dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
8.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Sosial Perkotaan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.535.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
8.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Sosial Politik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.712.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
8.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.053.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
9	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
9.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	84.586.800,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
9.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.441.400,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
9.3	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang Investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	86.271.800,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
10	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Cakupan kajian/penelitian dan pengembangan	100%	256.300.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
10.1	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis Bidang pemerintahan umum dan desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.591.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		
10.2	Penelitian / Kajian / Studi / Analisis	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.305.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00		

No	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Keterangan	
			TARGET Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)	I	II	III		IV
3	2 bidang Aparatur Pemerintahan dan Pelaksanaan Publik	3	4	5	6	7	8	9	10
10.3	Perencanaan / Kegiatan / Studi / Analisa bidang urusan daerah dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	3 dokumen	85.404.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11	Program Penanggulangan Inovasi Daerah	Cakupan Keterselesaian Data/Informasi Inovasi Daerah	100%	319.061.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.1	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Implementasi SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	1 dokumen	110.660.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.2	Inovasi Governance Award	Jumlah dokumen inovasi government award	1 dokumen	44.000.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
11.3	Inovtek	Jumlah inovator	1 dokumen	165.000.000,00	15,00	35,00	40,00	10,00	
		JUMLAH		2.874.421.545,00	17,37	35,31	32,56	14,74	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat (*Community Base Development*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) kebijakan dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan fungsi dan peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagai lembaga penelitian dan pengembangan sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah;
2. meningkatkan kualitas lembaga dan sumber daya manusia penelitian dan pengembangan serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerah guna penyelenggaraan dan peningkatan hasil penelitian dan pengembangan;
3. memaksimalkan penelitian dan pengembangan melalui kerja sama dengan lembaga peneliti lainnya (pihak ketiga/swasta) dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil melalui penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020
Nomor : 050/4548/35.07.202/2019

Pada hari ini senin tanggal 22 bulan juli tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri tim penyusun Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematis Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
- Kelima : Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang



Dra. MURSYIDAH, Apt. M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19621219 198903 2 005

Mengetahui,
Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomis Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

Bentuk PD: Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	BAGIAN	Isi	KESLUSUSAN			REKAMINDAH
			Ada	Ada Tetapi Sesuai	Tidak Ada	
I. PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	<p>Pengertian tingkat Renja</p> <p>Proses penyusunan Renja</p> <p>Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2020, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021</p> <p>Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD</p>	V			
1.2	Landasan Hukum	Dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	V			
1.4	Sistematisa Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	V			
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	<p>Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)</p> <p>Perbedaan capaian tahun berjalan (n-1)</p> <p>Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan:</p> <p>1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;</p> <p>2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;</p> <p>3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;</p> <p>4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpejuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;</p> <p>5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;</p> <p>6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut</p>	V			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	V			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	<p>Tingkat kinerja pelayanan PD</p> <p>Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD</p> <p>Daftar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, MDGs</p> <p>Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD</p> <p>Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut</p>	V			

2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan Alatan dan catatan penting perbedaan	V			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2020 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)	V			
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	V			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	V			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021	V			
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	V			
V PENUTUP						
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	V			



Tim Verifikasi :

1. Hariyati Andayani, SE,MM

Pembina

NIP. 19720819 199703 2 008

2. Herman Hidayat, S.Kom

Penata Tk. I

NIP. 19711205 200604 1 008